



<http://dx.doi.org/10.25157/jwp.v%vi%i.11141>

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Dan Kinerja Birokrasi (KPKB)

¹Nur Rizqi Arifin, ¹Lia Yulisma, ¹Tedi Setiadi, ¹Hendi S. Muchtar, ¹Nandang Koswara

¹Universitas Islam Nisantara, Jl. Soekarno Hatta No.530, Kota Bandung, Indonesia

Email: nur.rizqi88@gmail.com

Abstract

This research aims to describe educational policy and bureaucratic performance (KPKB) theoretically, conceptually, definitively, and substantively. The research method used in the research is literature study, namely by researching and understanding relevant books, documents, or other written sources. It supports the basic concept theory of Educational Policy and Bureaucratic Performance (KPKB). In this paper, bureaucratic performance has been discussed theoretically, conceptually, definitively, and substantively. Bureaucratic performance is key to a country's success in achieving national development goals. To ensure that bureaucratic performance can achieve these goals effectively and efficiently, it is necessary to understand the definition of bureaucratic performance, theories related to bureaucratic performance, as well as important concepts that must be understood in substantially understanding bureaucratic performance.

Keywords: Education Policy, Bureaucratic Performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB) Secara Teoritis, Konseptual, Definitif, dan Substantif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung teori konsep dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB). Dalam makalah ini, telah dibahas mengenai kinerja birokrasi secara teoritis, konseptual, definitif, dan substantif. Kinerja birokrasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Untuk memastikan bahwa kinerja birokrasi dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan cara yang efektif dan efisien, maka perlu dipahami definisi kinerja birokrasi, teori-teori yang terkait dengan kinerja birokrasi, serta konsep-konsep penting yang harus dipahami dalam memahami kinerja birokrasi secara substansial.

Kata Kunci: Konsep Dasar, Kebijakan Pendidikan, Kinerja Birokrasi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Cara sitasi:

Arifin, Nur Rizqi, et.al. (2024). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Dan Kinerja Birokrasi (KPKB). *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(2), 329-346

Sejarah Artikel:

Dikirim 06-07-2023, Direvisi 23-09-2023, Diterima 22-08-2024.

PENDAHULUAN

Pendidikan dan kinerja birokrasi merupakan dua aspek yang saling terkait dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan berkualitas adalah faktor penting untuk menciptakan

sumber daya manusia yang kompeten. Di sisi lain, kinerja birokrasi yang baik adalah landasan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Namun, saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi kedua aspek tersebut. Pertama, masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, menyebabkan kesenjangan dalam kompetensi sumber daya manusia. Kedua, birokrasi seringkali dihadapkan pada masalah inefisiensi, birokratisasi yang berlebihan, dan kurangnya transparansi, yang berdampak negatif pada implementasi kebijakan publik.

Secara teoritis, kajian tentang kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi dapat merujuk pada berbagai teori yang berkaitan dengan pendidikan dan administrasi publik. Misalnya, teori pendidikan berfokus pada pengaruh pendidikan terhadap perkembangan individu dan masyarakat, serta relevansinya dalam konteks pembangunan nasional. Di sisi lain, teori administrasi publik membahas tentang prinsip-prinsip, konsep, dan model-model pengelolaan birokrasi yang baik dan efisien (Isnaini Rodiyah et al., 2022). Dengan memadukan kedua bidang tersebut, kita dapat mengembangkan kerangka kerja kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kinerja birokrasi.

Secara konseptual, kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi perlu didefinisikan secara jelas dan terukur. Konsep pendidikan yang komprehensif mencakup aspek kurikulum, metode pembelajaran, penilaian, dan kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, konsep kinerja birokrasi mencakup berbagai dimensi, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efisiensi, dan efektivitas. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan dapat diukur dalam meningkatkan pendidikan dan kinerja birokrasi. Masalah penelitian dalam konteks ini adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan serta inefisiensi birokrasi yang menghambat kinerja dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Penelitian ini menyoroti isu ketimpangan akses pendidikan dan inefisiensi birokrasi sebagai hambatan utama dalam pembangunan, yang memberikan perspektif baru dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja birokrasi. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan dampak nyata dan terukur.

Dalam pengembangan kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi, penting juga untuk memiliki definisi yang definitif. Definisi yang jelas dan tegas akan membantu menghindari penafsiran yang ambigu dan memastikan pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan. Definisi definitif mengenai kebijakan pendidikan dapat mencakup target kualitas pendidikan, strategi implementasi, dan indikator keberhasilan. Sementara itu, definisi definitif mengenai kinerja birokrasi dapat mencakup standar pelayanan publik, prosedur kerja, dan ukuran keberhasilan dalam melayani masyarakat. Lebih jauh lagi, kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi harus memiliki substansi yang kuat. Substansi ini terkait dengan keberpihakan pada pemberdayaan individu dan masyarakat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan sumber daya yang memadai bagi penyelenggaraan kebijakan pendidikan yang efektif dan peningkatan kinerja birokrasi. Substansi kebijakan pendidikan juga harus mampu mencerminkan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, sementara substansi kebijakan kinerja birokrasi harus mampu menjamin tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman yang kuat tentang kinerja birokrasi secara teoritis, konseptual,

definitif, dan substantif yang mendasari Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan Dan Kinerja Birokrasi (KPKB).

Dengan memiliki latar belakang yang kokoh dalam pengkajian teoritis, konseptual, definitif, dan substantif, kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi dapat dirumuskan dan diimplementasikan dengan lebih efektif. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas birokrasi, penelitian dan diskusi terus menerus dalam bidang ini menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB). Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Studi deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian (Djaali, 2021; Firdaus, 2021; Hardani Ahyar, 2020; Suharsimi Arikunto, 2010). Kemudian (Sukardi, 2004) menambahkan, dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung teori konsep dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Tentang Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sebuah negara. Kebijakan ini harus dibuat secara cermat, terukur, dan berdasarkan pada teori-teori yang ada. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai kebijakan pendidikan secara teoritis, konseptual, definitif, dan substantif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kebijakan pendidikan dalam pembangunan nasional.

(Nugroho, 2008) mengatakan bahwa: "kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan". Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Penelitian ini berfokus pada konsep dasar kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi, serta mengidentifikasi masalah dan tantangan spesifik yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai konteks.

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

Kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan (Nugroho, 2008).

Tahap Kebijakan Pendidikan

Menurut (Syafarudin, 1994) ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses tersebut diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik. Tahap pertama dimulai dengan formulasi kebijakan. Formulasi atau pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis. Dalam konteks ini, aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan. Aktivitas politis itu berisi serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai rencana yang mencakup kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis dan manfaat yang dihasilkan, pelaksanaan program serta sumber daya yang dikerahkan. Tahap kedua adalah implementasi kebijakan, dimana pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahap ketiga dalam proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak terkait (*stakeholders*). Dengan kata lain, sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Di sisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan atau tujuan dengan kenyataan yang dicapai.

Evaluasi merupakan langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan memberikan informasi yang membolehkan stakeholder mengetahui apa yang terjadi berikutnya dari maksud kebijakan. Evaluasi juga memberikan paparan aktivitas implementasi kebijakan. Pada kompleksitas lebih besar evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan yang sesuai sasaran. Evaluasi dapat memberikan pemahaman terhadap alasan keberhasilan kebijakan atau kegagalan dan dapat memberikan sasaran terhadap tindakan untuk memberdayakan pencapaian sasaran kebijakan. Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu, tanpa pengujian pelaksanaan dan hasil usaha, ada sedikit kemungkinan keberhasilan pelaksanaan program.

Evaluasi kebijakan dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Di sini evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi kebijakan memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk masalah dan rekomendasi (Syafarudin, 1994).

Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Proses analisis

sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan (Irianto, 2012). Analisis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk gambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakannya. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, dikaji sampai pada ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan hambatan, halangan, gangguan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud. Analisis selanjutnya diarahkan pada kajian implikasi-implikasi keilmuan untuk membangun paradigma baru dalam konsep dan teori kebijakan pendidikan. Pada tahapan ini, kebijakan dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep dalam rangka profesionalisasi manajemen pendidikan.

Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen-komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi krisis multidimensional. Jika berangkat dari filosofi demokratisasi, pelayanan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang diwujudkan dalam misi dan tugas lembaga pendidikan, diperlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut merupakan standar, spesifikasi dan model normatif ini, dipakai untuk menseleksi bahan masukan untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran sebagaimana keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan bangsa (Irianto, 2012).

Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar (Hasbullah, 2015).

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.

Secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Empirik (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisa kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

b. Pendekatan Evaluatif (*Evaluatif Approach*)

Evaluasi menurut Imron adalah "salah satu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak". Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif.

Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan.

Evaluasi kebijakan organisasi merupakan aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai yang direncanakan (Sagala, 2009).

Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung sama lainnya diatur menurut urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis.

Tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. *Top leader* menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke staf untuk dibicarakan atau dimusyawarahkan

2) Formulasi kebijakan

Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan yang baik. Model-model ekonomi dan teori pengambilan keputusan merupakan analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik dan meminimalkan resiko kegagalan (Fatkuromi, 2012).

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

a. Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi berasal dari kata "legitimacy" yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Kata legitimasi juga berasal dari kata "*legitimation*" yang artinya suatu proses khusus dimana program-program pemerintah diabsahkan. Legitimasi merupakan tahapan yang penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan sebagian masyarakat maupun yang merugikan kelompok lain. Selain itu, setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah. Kebijakan yang sudah diformulasikan harus dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan di masyarakat. Legitimasi kebijakan artinya alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga pendidikan.

Proses kebijakan memerlukan legitimasi guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses.

Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan dapat berupa pengabsahan dan otorisasi. Pengabsahan adalah suatu proses dimana kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan diabsahkan. Sedangkan otorisasi adalah kewenangan untuk memberlakukan sebuah kebijakan. Dari otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

b. Implementasi Kebijakan

Menurut *Richard Gorton* dan *Scheneider* "*Implementing involves administrators in the process of making sure that the plant is carried out as intended.*" (Gorton and Scheineder, 1991:65). Artinya implementasi melibatkan seorang administrator pada proses memastikan rencana berjalan sesuai yang dikehendaki. Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Sebuah kebijakan perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang 26 lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu perlu adanya pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi lainnya. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, M. Hasbullah mengutip pendapat Siagian yang mengemukakan perlu perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh antara lain; (1) manusia, (2) struktur, (3) proses administrasi dan manajemen, (4) dana,

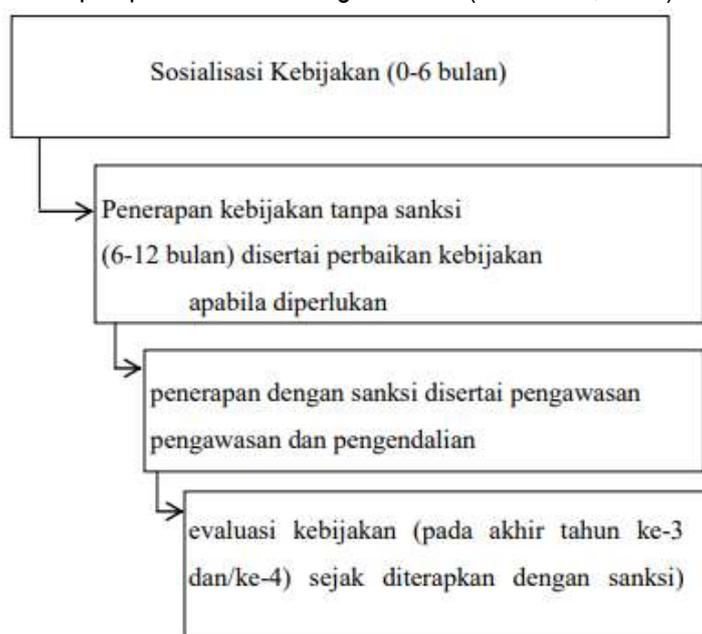
(5) daya. Lima faktor tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan (Hasbullah, 2015).

Suatu tindakan administratif sangat diperlukan untuk upaya pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses, maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan seperti: kelompok formal, informal, suprastruktur, infrastruktur, dan fungsional. Semua itu saling terkait dan sangat menentukan akan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Proses penetapan kebijakan bisa mulai apabila tujuan dan sasaran telah diperinci. Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan rumusan, tujuan, dan sasaran maka dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut adalah kurang berhasil, keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari dampak positif kebijakan tersebut bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Mengenai tata urutan dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan sebagaimana tampak pada skema sebagai berikut (Hasbullah, 2015):



Gambar 1. Bagan Visualisasi tata urutan implementasi kebijakan pendidikan

- 1) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijaksanaan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi

dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media saat pertemuan langsung dengan masyarakat.

- 2) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan.
- 3) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian.
- 4) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilakukanlah evaluasi kebijakan pendidikan.

c. Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan yang sudah dirumuskan tentunya akan melewati tahap implementasi. Agar sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan maka perlu adanya monitoring serta evaluasi dari kebijakan yang sudah diambil. Proses monitoring merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan memberikan informasi nyata terkait realita lapangan.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan. Menurut Dunn monitoring berfungsi sebagai berikut:

- 1) Ketaatan (*compliance*)
Menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*)
Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran atau belum.
- 3) Laporan (*accounting*)
Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu.
- 4) Penjelasan (*explanation*)
Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan (Hasbullah, 2015)

Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Menurut (Gorton & Schneider, n.d.): "*evaluation can be defined as the process of examining as carefully, thoroughly, and objectively as possible an individual, group, product, or program to ascertain strengths and weakness*" Artinya evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai secara teliti, menyeluruh, dan objektif secara individu atau kelompok untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan dari produk atau program. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana, tujuan, maupun sasaran maka perlu ada langkah baru yang harus diambil untuk mengganti kebijakan yang dirasa gagal tersebut. Hasil penilaian dari proses evaluasi dijadikan sebagai masukan atau umpan balik untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Evaluasi yang baik tidak

hanya melihat pada hasil akhir saja, tetapi juga melihat pada setiap tahapan dalam proses kebijakan.

Teori-Teori dalam Kebijakan Pendidikan

Teori Psikologi Pendidikan

Sistematika psikologi dalam pendidikan adalah sub-disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologi dalam pendidikan yang selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk konsep, teori dan metode sebagai solusi dari masalah-masalah itu (Hidayah et al., 2017). Selain itu psikologi pendidikan menjelaskan serta karakteristik atau pola pembelajaran yang di sesuaikan berdasarkan usia (perkembangan kognitifnya). Salah satu contoh belajar sesuai usia yaitu apabila peserta didik berusia 5 tahun, menggunakan metode pembelajaran dengan sambil bermain. Jika sudah usia remaja bisa diterapkan metode belajar dengan diskusi kelompok. Ada beberapa kumpulan teori psikologi pendidikan yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi yaitu, teori behavioristik (*Behaviorisme*), teori kognitif, teori humanisme, dan teori konstruktivisme (Saefiana, 2022).

Teori Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan adalah studi mengenai bagaimana institusi publik dan pengalaman individu memengaruhi pendidikan dan hasilnya. Pendidikan selalu dilihat sebagai usaha manusia optimistik mendasar yang dikenali dari aspirasi untuk kemajuan dan kesejahteraan. (Ladaria, 2020). Pendidikan dipahami oleh banyak orang sebagai usaha untuk mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi dan memperoleh kekayaan dan status sosial. Pendidikan dianggap sebagai tempat anak-anak bisa berkembang sesuai kebutuhan dan potensi unik mereka. Selain itu juga sebagai salah satu arti terbaik dalam mencapai kesetaraan sosial yang lebih tinggi. Banyak orang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan setiap orang hingga potensi tertinggi mereka dan memberi kesempatan untuk mencapai segalanya dalam kehidupan sesuai kemampuan alami mereka (meritokrasi). Berikut ini teori sosiologi pendidikan (Arif, 2020):

1) Teori Fungsionalisme

Tokoh sosiologi klasik Emile Durkheim adalah salah satu teoritis fungsi sosial dalam pendidikan. Durkheim meyakini bahwa pendidikan moral dibutuhkan untuk membangun dan menjaga solidaritas sosial di masyarakat. Solidaritas sosial yang menguat mengurangi munculnya gejala disintegrasi sosial dan masalah-masalah sosial lainnya. Pendidikan moral adalah sarana menuju sebuah tatanan kehidupan sosial yang harmonis.

2) Teori Konflik oleh Karl Marx

Teori konflik ala Karl Marx memberikan pandangan berbeda dari teori fungsionalisme. Dalam teori ini, tujuan pendidikan adalah sebagai cara untuk menjaga ketimpangan sosial dan mempertahankan kekuatan pihak yang mendominasi dalam suatu kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, teori konflik menunjukkan ketidaksetaraan sosial melalui penggunaan dan pengujian standar dari sebuah kurikulum pembelajaran terselubung. Kualitas dan fasilitas antar-sekolah yang seringkali mengalami ketimpangan adalah contohnya.

3) Teori Interaksionisme Simbolik

Perpaduan dari pemikiran Herbert Blumer, George Herbert Mead dan Max Weber, melahirkan teori ini yang memberikan analisa tentang masyarakat berdasarkan subjektivitas yang diciptakan oleh individu dalam interaksi sosial. Teori ini meyakini bahwa seseorang

bergerak berdasarkan apa yang diyakini selama ini, bukan secara obyektif. Keyakinan tersebut kemudian dinamakan sebagai representasi sosial yang memberikan definisi dalam kehidupan sosial.

Teori Antropologi Pendidikan

Teori antropologi pendidikan merupakan suatu cabang antropologi yang mempelajari bagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat memengaruhi pendidikan dan bagaimana pendidikan memengaruhi masyarakat. Teori ini mencoba untuk memahami peran dan fungsi pendidikan dalam suatu masyarakat, serta bagaimana pengalaman pendidikan memengaruhi cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi di dalam masyarakat (Elia et al., 2023).

Dalam teori antropologi pendidikan, pendidikan dianggap sebagai proses sosialisasi yang sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Pendidikan juga memainkan peran dalam membentuk identitas individu dan memberi mereka keterampilan dan pengetahuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan konteks sosial, pendidikan dapat menjadi alat untuk mempromosikan keadilan sosial dan meredakan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Beberapa konsep kunci dalam teori antropologi pendidikan antara lain:

- a. **Kultur:** Setiap masyarakat memiliki sistem nilai, kepercayaan, dan tradisi yang unik. Kultur memengaruhi pendidikan dan cara individu belajar serta bagaimana mereka melihat dunia.
- b. **Sosialisasi:** Proses belajar yang terjadi saat individu bergabung dengan masyarakat dan mengadopsi norma-norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan dari mereka.
- c. **Pendidikan formal dan informal:** Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan diatur oleh lembaga pendidikan, sedangkan pendidikan informal terjadi melalui pengalaman sehari-hari dalam masyarakat.
- d. **Pembelajaran kontekstual:** Individu belajar melalui pengalaman dan situasi yang kontekstual dan terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka.
- e. **Pluralisme dan multikulturalisme:** Masyarakat modern terdiri dari banyak kelompok etnis dan budaya yang berbeda. Pendidikan harus memperhitungkan keragaman ini dan menghormati budaya dan kepercayaan yang berbeda.

Teori Ekonomi Pendidikan

Teori ekonomi memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan pendidikan, karena pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan pertumbuhan sosial. Berikut adalah beberapa cara bagaimana teori ekonomi mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan pendidikan:

- a. **Menentukan investasi pendidikan:** Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi alokasi sumber daya ke pendidikan dengan mempertimbangkan manfaat investasi jangka panjang dari pendidikan.
- b. **Menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.** Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi penentuan kurikulum dan program pendidikan, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pasar tenaga kerja.
- c. **Meningkatkan kemampuan manusia:** Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi penentuan tujuan dan strategi pendidikan untuk mencapai kemampuan dan kapabilitas yang lebih tinggi bagi individu dan masyarakat.

- d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi alokasi anggaran pendidikan, strategi pengembangan pendidikan, serta penentuan prioritas dan kebijakan penghematan.
- e. Meningkatkan partisipasi publik: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi proses perumusan kebijakan pendidikan, termasuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah beberapa teori ekonomi yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:

- a. Teori investasi manusia: Teori ini mengatakan bahwa pendidikan adalah sebuah investasi manusia yang akan menghasilkan keuntungan di masa depan dalam bentuk produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi.
- b. Teori pasar tenaga kerja: Teori ini mengatakan bahwa kebijakan pendidikan harus mengakomodasi permintaan tenaga kerja dari sektor industri dan menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.
- c. Teori kapabilitas manusia: Teori ini mengatakan bahwa pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan membuat kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat sekitar mereka.
- d. Teori pilihan publik: Teori ini mengatakan bahwa kebijakan pendidikan harus didasarkan pada proses pengambilan keputusan yang transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas.
- e. Teori pengeluaran publik: Teori ini mengatakan bahwa kebijakan pendidikan harus memperhitungkan biaya dan manfaat dari pendidikan dalam menghasilkan hasil sosial dan ekonomi yang diinginkan.

Teori Politik Pendidikan

Teori politik memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan pendidikan karena pendidikan adalah masalah politik dan kebijakan pendidikan sering kali menjadi arena pertarungan kepentingan politik. Berikut adalah beberapa cara bagaimana teori politik mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan pendidikan:

- a. Memengaruhi agenda politik: Teori agenda-setting mengatakan bahwa agenda politik dan kebijakan publik ditentukan oleh kekuatan dan kepentingan politik yang ada di dalamnya.
- b. Menentukan kebijakan pendidikan: Teori pengambilan keputusan politik memandang bahwa proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuasaan, dan pengaruh kelompok-kelompok kepentingan.
- c. Meningkatkan partisipasi publik: Teori partisipasi politik mengatakan bahwa partisipasi aktif dan terlibat dari masyarakat sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan.
- d. Mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas: Teori pluralisme politik mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok dan kepentingan, dan kebijakan publik harus mempertimbangkan kepentingan kelompok minoritas.
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Teori akuntabilitas politik dan transparansi menyatakan bahwa kebijakan publik harus akuntabel dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan publik (Asdrayany et al., n.d.)

Beberapa teori politik yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan antara lain:

- a. Teori agenda-setting: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi pemilihan isu-isu pendidikan yang menjadi prioritas dan perhatian politik.
- b. Teori pengambilan keputusan politik: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi proses pembuatan kebijakan pendidikan, termasuk pengambilan keputusan tentang tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya pendidikan.
- c. Teori partisipasi politik: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pendidikan.
- d. Teori pluralisme politik: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi pentingnya mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif kelompok minoritas, seperti kelompok miskin, kelompok berkebutuhan khusus, dan kelompok etnis atau agama tertentu.
- e. Teori akuntabilitas politik dan transparansi: Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, teori ini mempengaruhi pentingnya menetapkan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Pendidikan (Muadi, 2016).

Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Secara Konseptual

Kebijakan pendidikan secara konseptual berkaitan dengan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Konsep-konsep tersebut meliputi kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, konsep-konsep tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam pembuatan kebijakan pendidikan antara lain:

- a. Tujuan pendidikan: Konsep dasar yang paling mendasar dalam pembuatan kebijakan pendidikan adalah menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan dapat berkaitan dengan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, meningkatkan partisipasi dan akses pendidikan, atau memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
- b. Standar pendidikan: Konsep dasar lainnya adalah menentukan standar pendidikan yang ingin dicapai. Standar pendidikan mencakup pengetahuan dan keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa, serta metode dan strategi pembelajaran yang digunakan.
- c. Kurikulum: Konsep dasar yang lain adalah kurikulum, yaitu rencana pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar pendidikan. Kurikulum mencakup bahan ajar, metode pembelajaran, serta evaluasi dan pengukuran hasil belajar.
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan: Konsep dasar lainnya adalah menentukan kualifikasi, pelatihan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya.
- e. Pembiayaan pendidikan: Konsep dasar terakhir adalah pembiayaan pendidikan, yaitu menentukan sumber dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Pembiayaan pendidikan dapat berasal dari sumber pemerintah, swasta, atau internasional, dan harus dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan standar pendidikan yang telah ditetapkan. Konsep-konsep dasar ini harus

dipertimbangkan secara holistik dan terintegrasi dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kebijakan Pendidikan Secara Definitif

Kebijakan pendidikan secara definitif merujuk pada keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Keputusan-keputusan tersebut meliputi tujuan-tujuan pendidikan, program-program pendidikan, dan anggaran pendidikan. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, keputusan-keputusan tersebut harus diambil secara tepat dan akurat. Sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.



Gambar 2. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Secara Substantif

Kebijakan pendidikan secara substantif berkaitan dengan substansi atau isi dari kebijakan pendidikan. Substansi tersebut meliputi materi pelajaran, nilai-nilai pendidikan, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan, substansi tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja. Sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam kebijakan pendidikan secara substantif, terdapat beberapa isu inti yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Tujuan dan standar pendidikan: Kebijakan pendidikan secara substantif memperhatikan tujuan dan standar pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan dan standar pendidikan dapat mencakup pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai siswa, serta nilai-nilai yang ingin ditransmisikan melalui pendidikan.
- b. Kurikulum: Kebijakan pendidikan secara substantif memperhatikan kurikulum, yaitu rencana pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar pendidikan. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- c. Metode pembelajaran: Kebijakan pendidikan secara substantif juga memperhatikan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan standar pendidikan. Metode pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran, serta dapat memfasilitasi proses belajar yang efektif dan bermakna.

- d. Evaluasi: Kebijakan pendidikan secara substantif memperhatikan evaluasi, yaitu proses pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa. Evaluasi harus sesuai dengan tujuan dan standar pendidikan, serta dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi proses pembelajaran.
- e. Pembiayaan pendidikan: Kebijakan pendidikan secara substantif juga memperhatikan pembiayaan pendidikan, yaitu sumber dan alokasi sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Pembiayaan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pendidikan, serta dapat dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan standar pendidikan.

Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan dalam tatanan kebijakan. Karena implementasi kebijakan merupakan proses yang sifatnya sangat penting. Dapat diibaratkan implementasi kebijakan adalah penentu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Namun proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang oleh Dunsire yang dikutip hasbullah, dinamakan sebagai "*implementation gap*" yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Menurut Pieters sebagaimana yang dikutip oleh (Hasbullah, 2015) bahwa sangat diperlukan instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- a. Hukum

Hukum menjadi instrumen yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dalam hukum terdapat unsur paksaan dari pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa memiliki legitimasi untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan yang dapat memaksa setiap anggota atau warga sekolah untuk mentaatinya. Sebagai instrumen kebijakan, hukum mempunyai kegunaan untuk mengatur kedudukan warga negara/ sekolah dan hukum merupakan alat pengatur kehidupan warga negara/ sekolah.

- b. Service

Dalam implementasi kebijakan, birokrasi atau pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan fasilitas ataupun layanan pendidikan.

- c. Dana

Ketersediaan dana merupakan instrumen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya finansial yang cukup maka kebijakan akan berjalan dengan baik itu pada tahap makro maupun mikro.

- d. Situasi

Apabila semua instrumen di atas gagal digunakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kedudukan pemerintah dan lembaga politik lain, sepanjang mereka masih memiliki legitimasi masyarakat, mereka mempunyai posisi yang menguntungkan untuk menumbuhkan keyakinan dalam mempengaruhi masyarakat, sebab mereka memiliki akses untuk berbicara atas nama kepentingan umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pemahaman yang mendalam tentang kinerja birokrasi secara teoritis, konseptual, definitif, dan substantif adalah fondasi krusial dalam mengembangkan Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB). Kerangka kerja komprehensif ini mengintegrasikan teori administrasi publik, mencakup aspek akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik, dengan konsep kebijakan pendidikan yang melibatkan kurikulum, metode pembelajaran, dan pembiayaan yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan holistik dan sistemik, kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk responsif dan relevan, serta mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Di samping itu, kinerja birokrasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional secara tepat sasaran.

REKOMENDASI

Dalam membantu pemahaman dan implimentasi Kebijakan Pendidikan dan Kinerja Birokrasi (KPKB) secara teoritis, konseptual, definitif, dan substantif diharapkan pihak terkait dapat menerapkan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman terhadap definisi kinerja birokrasi: Para pemangku kebijakan dan praktisi birokrasi perlu mendalami definisi kinerja birokrasi dengan lebih baik. Hal ini melibatkan pemahaman yang komprehensif tentang indikator-indikator kinerja, termasuk efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam konteks pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional.
2. Mengintegrasikan teori-teori terkait kinerja birokrasi: Studi ilmiah tentang kinerja birokrasi dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kebijakan. Disarankan untuk mengintegrasikan berbagai teori yang berkaitan dengan kinerja birokrasi, seperti teori agensi, teori manajemen publik, dan teori organisasi, untuk memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja birokrasi.
3. Memperkuat konsep-konsep penting dalam pemahaman kinerja birokrasi: Ada beberapa konsep penting yang harus dipahami dengan baik untuk memahami kinerja birokrasi secara substansial. Misalnya, penting untuk memahami peran birokrasi dalam implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, partisipasi publik, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kontekstual.
4. Menerapkan pendekatan yang efektif dan efisien: Pemangku kebijakan perlu berfokus pada pengembangan strategi dan pendekatan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja birokrasi. Ini mencakup penerapan praktik manajemen yang baik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang obyektif.
5. Mendorong akuntabilitas dan transparansi: Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi. Para pemangku kebijakan harus mendorong adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk pelaporan publik, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi dan mendorong pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi Syafarudin. (1994). *Alat-alat Analisis dalam Pembelajaran*. Andi Offset.

- Arifuddin M. Arif. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Asdrayany, D., Najmi Muhajir, M., Fauzi, A., Qurtubi, A., Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U., Jendral Sudirman, J. N., Cipocok Jaya Kec Serang, P., & Serang, K. (n.d.). Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. *Journal on Education*, 06(01), 6840–6852.
- Djaali. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Elia, R., Tinggi, K., Baso, K., & Agam, K. (2023). Implikasi Antropologi dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(2), 1715–1722. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/892/718>
- Fatkuroji. (2012). 591-1054-1-SM. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 249–268.
- Firdaus. (2021). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. DOTPLUS Publisher.
- Gorton, R. A., & Schneider, G. T. (n.d.). *School Based Leadership, Challenges and Opportunities*. Wm.C. Brown Publishers.
- Hardani Ahyar. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- H.M. Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada.
- Isnaini Rodyah, Hendra Sukmana, & Lailul Mursyidah. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*.
- Nur Hidayah, Hardika, Yuliati Hotifah, Sinta Yuni Susilawati, & Imam Gunawan. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Universitas Negeri Malang.
- Riant Nugroho. (2008). *Public Policy*. PT. Elex Media Komputindo.
- Saefiana, F. D. S. R. D. A. M. R. (2022). 3976-Article Text-6882-1-10-20220725. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1), 150–158. <https://ummaspul.e-journal.id/MGR/issue/view/80>
- Sholih Muadi, I. M. A. S. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sukardi. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara.
- Syaiful Sagala. (2009). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Alfabeta.
- Yessi H. Ladaria. (2020). 4445-Article Text-10787-1-10-20230526. *HOLISTIK: Journal of Social and Culture*, 13(1), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/29334>
- Yoyon Bahtiar Irianto. (2012). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan; Konsep, Teori, dan Model (2nd ed.)*. Rajagrafindo Persada.

